

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara berbasis desa/kelurahan, sebab 82,3% wilayah Indonesia merupakan kawasan perdesaan. Jumlah desa/kelurahan di Indonesia pada tahun 2011 sebanyak 78.609 dan pada tahun 2013 mencapai 80.714, sedangkan jumlah desa/kelurahan di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2011 sebanyak 8.503 dan pada tahun 2013 meningkat menjadi sebanyak 8.505. Kondisi saat ini kekuatan ekonomi desa tidak berdaya terhadap mekanisme pasar, dan desa selalu berada pada ketidakberdayaan dan ketidakseimbangan ketika berhubungan dengan kota, dalam menghadapi ancaman keterbelakangan dan ketidakadilan dalam pembangunan.

Desa sebagai wilayah yang bertumpu pada potensi lokal, terutama perekonomian berbasis pertanian (dalam arti luas) dan UMKM di tengah pertumbuhan industri global, ternyata posisinya lemah. Ada semacam dilema, karena kemiskinan dan pengetahuan yang rendah menyebabkan pemanfaatan sumber daya melewati batas untuk bertahan hidup, akan tetapi di sisi lain, banyak sumber daya yang ternyata belum dimanfaatkan secara optimal, seperti matahari, air, angin, tanaman, ikan, ternak, dan tenaga manusia. Hal tersebut disebabkan karena masih terbelakangnya masyarakat desa, kurangnya modal, keterbatasan pengetahuan dan tingkat produktivitas yang rendah, sehingga berimplikasi pada tingkat pendapatan yang rendah. Permasalahan lain yang

ditemukan di perdesaan adalah masih lemahnya masyarakat dan aparat desa dalam merencanakan pembangunan, masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, masih lemahnya kegiatan ekonomi desa.

Pembangunan ekonomi lokal tidak dapat dilepaskan dari upaya mendorong pengembangan tingkat desa dengan berbasis pada kearifan lokal, potensi sumber daya dan keunikannya. Desa-desanya yang mampu mendayagunakan kearifan lokal dan sumber dayanya dengan cara yang berbeda dapat dikembangkan menjadi desa inovasi. Istilah Desa Inovasi adalah desa yang mampu memanfaatkan sumber daya desanya dengan cara baru, mengacu pada gagasan bahwa desa dalam kehidupannya untuk melakukan kegiatan-kegiatannya bukan hanya sekedar rutinitas hidup saja, tetapi kehidupan yang selalu bergerak penuh dengan inovasi-inovasi dalam meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Sebagaimana inovasi yang terus dilakukan oleh kota-kota lainnya, desapun perlu melakukan inovasi-inovasi. Pengembangan desa inovasi dapat menjadi salah satu solusi percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pengembangan desa inovasi dapat menjadi salah satu solusi percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Guna mengembangkan desa inovasi identifikasi potensi daerah secara menyeluruh. Identifikasi potensi wilayah merupakan aktivitas mengenal, memahami dan merinci secara keseluruhan potensi (SDA & SDM) yang dimiliki wilayah baik yang telah dimobilisir maupun yang belum dimobilisir yang dapat mendukung upaya meningkatkan kesejahteraan penduduk melalui pengembangan desa inovasi.

Menurut Dr. Tatang A Taufik upaya pembangunan desa yang inovatif, inklusif dan berkelanjutan dilakukan dengan penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (IPTEKIN) dengan sistem inovasi sebagai *vehicle* nya. Di dalam sistem inovasi unsur pelaku (elemen) yang harus dilibatkan terdiri dari unsur pemerintah, pebisnis, akademisi dan komunitas (ABG+C). Untuk itu prakarsa pengembangan desa-desa inovatif perlu didorong dan dikembangkan untuk mempercepat keberhasilan pembangunan desa sehingga menjadi inspirasi bagi pembaruan desa-desa lainnya.

Desa inovasi merujuk pada suatu kondisi desa Inovatif. Artinya, desa yang mampu memanfaatkan sumberdaya desa dengan cara baru. Untuk mengembangkan desa inovasi, pemerintah perlu untuk mengidentifikasi potensi, terutama karakter unik pada suatu desa yang memungkinkan dikembangkan menjadi desa inovasi. Pengembangan desa inovasi hendaknya sesuai dengan potensi yang ada, sedangkan hal yang sangat penting dalam pengembangan desa inovasi adalah komitmen dari semua pemangku kepentingan. Dalam tahap awal pengembangan desa inovasi, pemerintah akan memegang peran yang lebih besar sebagai fasilitator maupun pengembang jejaring maupun dalam hal pembiayaan. Masyarakat relatif mudah menerima perubahan, namun masyarakat cenderung memerlukan bukti untuk dapat sungguh-sungguh terlibat dalam pengembangan desa inovasi. Bertitik tolak dari permasalahan utama pengembangan desa inovasi, kebijakan umum pengembangan desa inovasi hendaknya diarahkan pada penguatan faktor-faktor pendukung pengembangan desa inovasi baik fisik maupun non fisik diantaranya dengan:

- a. Meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai desa inovasi
- b. Meningkatkan kesiapan masyarakat sebagai subyek pengembangan desa inovasi
- c. Meningkatkan dukungan kelembangaan
- d. Meningkatkan sistem pengelolaan potensi pendukung pengembangan desa Inovasi
- e. Dukungan infrastruktur yang memadai

Pengembangan desa inovasi pada dasarnya dapat diterapkan pada beberapa sektor diantaranya adalah pengembangan desa inovasi sektor pariwisata yang merupakan salah satu strategi yang perlu dikembangkan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang timbul di desa terutama dalam rangka meningkatkan daya saing desa yang kemudian berujung pada peningkatan daya saing daerah. Pemerintah daerah dalam hal ini sudah seharusnya untuk menyusun kebijakan yang mendorong terwujudnya desa inovasi sektor pariwisata yang selama ini belum dilaksanakan secara optimal.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*), pariwisata merupakan salah satu sektor utama yang digalakkan Pemerintah. Pariwisata mempunyai peranan penting dalam pembangunan baik dari aspek ekonomi, sosial dan budaya. Melalui pariwisata, masyarakat lokal dapat terbantu secara baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka meningkatkan taraf perekonomiannya. Dalam mengembangkan dan memajukan pariwisata, banyak elemen-elemen penting yang harus dibangun di dalamnya.

Sumber daya manusia merupakan elemen terpenting dalam mengangkat kepariwisataan di suatu daerah tertentu.

1.2 Rumusan Masalah

Kebijakan pengembangan desa inovasi sektor pariwisata sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing daerah sangatlah tidak mudah dilaksanakan dan menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur, adapun permasalahan yang dikaji adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana arah kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dalam menumbuhkan desa inovasi sektor pariwisata di Jawa Timur ?
- b. Bagaimana potensi pengembangan desa inovasi sektor pariwisata di Jawa Timur ?
- c. Apakah hambatan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan desa inovasi sektor pariwisata di Jawa Timur ?
- d. Bagaimana strategi Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menghadapi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan desa inovasi sektor pariwisata di Jawa Timur ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak didapat dari kajian ini, adalah sebagai berikut:

- a. Menganalisis arah kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menumbuhkan desa inovasi sektor pariwisata di Jawa Timur.

- b. Menganalisis potensi pengembangan desa inovasi sektor pariwisata di Jawa Timur.
- c. Mengidentifikasi hambatan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan desa inovasi sektor pariwisata di Jawa Timur.
- d. Mendapatkan strategi dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan desa inovasi sektor pariwisata di Jawa Timur.

1.4 Hasil yang diharapkan

Hasil yang diharapkan dari kajian ini adalah sebagai berikut:

- a. Adanya arah kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota yang mendukung pengembangan desa inovasi sektor pariwisata di Jawa Timur.
- b. Tersedianya informasi tentang potensi pengembangan desa inovasi sektor pariwisata di Jawa Timur.
- c. Memberikan solusi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan desa inovasi sektor pariwisata di Jawa Timur.
- d. Adanya strategi dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan desa inovasi sektor pariwisata di Jawa Timur.

1.5 Ruang lingkup

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan tersebut di atas, maka fokus dari kajian ini adalah:

- a. Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menumbuhkan desa inovasi sektor pariwisata di Jawa Timur.
- b. Melakukan kajian terhadap berbagai instrumen kebijakan yang ada berkaitan dengan pengembangan desa inovasi sektor pariwisata di Jawa Timur, sehingga akan diketahui sejauhmana arah kebijakan tersebut dapat menunjang pengembangan desa inovasi sektor pariwisata di Jawa Timur.
- c. Berusaha memperoleh gambaran nyata tentang potensi daerah berkaitan dengan pengembangan desa inovasi sektor pariwisata.
- d. Melakukan kajian tentang peran Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menumbuhkan desa inovasi sektor pariwisata di Jawa Timur.
- e. Melakukan kajian terhadap upaya Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menghadapi hambatan pelaksanaan kebijakan pengembangan desa inovasi sektor pariwisata di Jawa Timur.